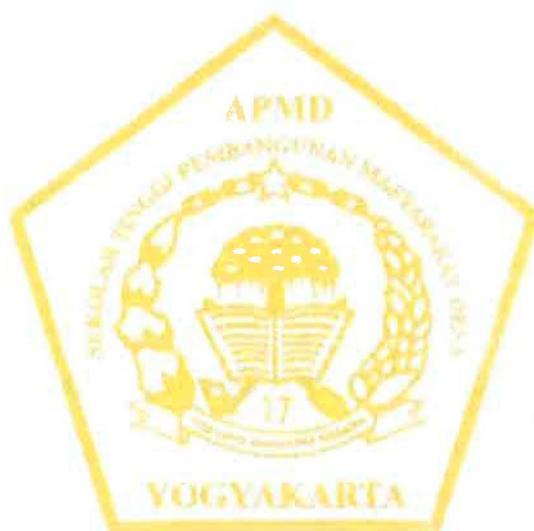


SKRIPSI

**FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM
DI KALURAHAN KARANGAWEN, KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN
GUNUNG KIDUL**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang
Pendidikan Strata Satu (S1)**



Disusun Oleh :

Aleksander Briantis Batista
NIM. 19520052

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 06 April 2023
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi

TIM PENGUJI

TANDA TANGAN

Ir. Nelly Tiurmida, MPA
Ketua/Penguji/Pembimbing



Utami Sulistiani, S.P.,M.P
Penguji Samping 1



Drs. Suharyanto, M.M
Penguji Samping 2



Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Kiki Samaloisa

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aleksander Briantis Batista

NIM : 19520052

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan UMKM Di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 25 April 2023

Penulis



Aleksander Briantis Batista

MOTTO

MENYERAH HANYA PANTAS UNTUK ORANG KALAH DAN LEMAH

(Aleksander Briantis Batista)

Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan

(Amsal 28:13)

Hidup Itu Seperti Sebuah Sepeda, Agar Tetap Seimbang Kita Harus Tetap Bergerak.

(Albert Einstein)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ditempat kelahiran saya, menempuh pendidikan sampai menyelesaikan gelar sarjana merupakan kebanggaan besar dan kehormatan tersendiri atas pencapaian keberhasilan yang sangat disyukuri. Secara pribadi, ditengah keterbatasan atas pencapaian dengan penuh rasa syukur dan sukacita, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria, karena atas segala kasih, karunia dan perlindungan-Nya kepada penulis.
2. Keluarga saya telah memberikan banyak dukungan baik moril maupun materil juga doa:
 - Kedua Orang tua saya: Bapak Gunsu Nawur dan Mama Martha Meldin
 - Kaka saya dan adik saya: Verena Vinata, Claudia Amanta dan Kimsa Ananta
 - Almarhumah Nene Mama Monika Nerut dan Alm. Nene Bapa Niko Nawur
 - Keluarga besar Mawe, Wangkar, Bali dan Keluarga besar Nene Bapa Niko Nawur yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya dalam tulisan ini.
3. Almamater tercinta STPMD "APMD" Yogyakarta.
4. Ibu Ir. Nelly Tiurmida, MPA selaku dosen pembimbing saya yang selalu sabar dan total membimbing saya dalam menyelesaikan tulisan ini
5. Keluarga Manggarai Jogja yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya dalam tulisan ini

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria dan Roh Kudus atas berkat, kasih dan perlindungannya, sehingga tugas akhir skripsi dengan judul **“Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan UMKM Di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, KABUPATEN GUNUNG KIDUL”**, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, dapat terselesaikan dengan baik.

Sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan, tentunya tugas Skripsi ini masih belum dapat dikatakan sempurna. Sehingga ini menjadi refleksi penting penulis untuk terus mendalami pemahaman dan pengetahuan agar menjadi lebih baik di kemudian hari, sekaligus penulis sangat terbuka dengan kritikan yang membangun sehingga karya ini selalu menghadirkan diskursus dalam rana akademik.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan doa, bimbingan maupun saran yang berguna dalam menyusun skripsi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria dan Roh Kudus atas berkat, kasih dan perlindunganNya kepada penulis sehingga tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua saya yang saya cintai, Bapak Gunsu Nawur dan Mama Martha Meldin yang selalu memberikan kasih dan sayang yang tak terhingga kepada saya.
3. Kaka Saya dan adik saya: Verena Vinata, Claudia Amanta dan Kimsa Ananta
4. Alm. Nene Bapa Nikolaus Nawur dan Almarhumah Nene Mama Monika Nerut
5. Keluarga besar Mawe, Wangkar, Bali dan Keluarga besar Nene Bapa Niko Nawur yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya dalam tulisan ini.
6. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari ilmu pengetahuan di STPMD “APMD” Yogyakarta.

7. Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
8. Ir. Nelly Tiurmida, MPA sebagai dosen pembimbing yang sangat sabar dan total membimbing penulis dalam pembuatan skripsi
9. Utami Sulistiana, S.P.,M.P dan Drs. Suharyanto, MM Sebagai dosen penguji skripsi dan seluruh dosen STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada saya.
10. Teman-teman dan saudara-saudara saya dimanapun mereka berada yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi, terkhususnya kepada Saudara-saudara saya Kk Intan Hadiman, Kae (Kk) Gilberto Hadiman, Kae Riky Pandong, Andok Jarut, Ella Ntriani, Tania Nggabuk, Prisca Ecin dan teman-teman saya Adven, Aris Rolis, Sony Rilman, Andri Sumarsin atas dukungan dan doa yang mereka berikan kepada saya selama perkuliahan dan menyusun skripsi hingga saya selesai menyelesaikan tugas akhir saya ini.
11. Pemerintah dan Masyarakat Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, yang telah memberikan izin penelitian selama peneliti melaksanakan proses penelitian.
12. Almamater tercinta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta.
13. Serta pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yang dengan caranya masing-masing mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 25 April 2023

Penulis



Aleksander Briantis Batista

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
INTISARI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Literature Review	7
F. Kerangka Teori	18
1. Governing	18
2. Desa/Kalurahan	19
3. Fasilitasi Pemerintah	27
4. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)	29
G. Ruang Lingkup Penelitian	33
H. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33

2. Objek Penelitian	34	
3. Subjek Penelitian	35	
4. Lokasi Penelitian	35	
5. Teknik Pengumpulan data	36	
6. Teknik Analisis Data	37	
7. Metode Penyajian Data	38	
BAB II	DESKRIPSI WILAYAH KALURAHAN KARANGAWEN, KAPANEWON, GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNG KIDUL	39
A. Geografis		39
B. Demografis		42
C. UMKM		46
D. Sarana dan Prasarana		50
E. Budaya		53
F. Pemerintahan		53
G. Visi dan Misi		54
BAB III	FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KALURAHAN KARANGAWEN, KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNG KIDUL	56
A. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Dalam Mengembangkan UMKM		57
B. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM		69
BAB IV	SARAN DAN KESIMPULAN	76
A. Kesimpulan		76

B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	43
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	44
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	45
Tabel 2.5 Data Pelaku UMKM dan Hasil Usaha	48
Tabel 3.1 Data Informan	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kalurahan Karangawen	41
Gambar 2.2 Struktur Pemerintahan Kalurahan Karangawen	53

INTISARI

Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan UMKM di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Oleh Aleksander Briantis Batista, tujuan penelitian ini berguna untuk mengetahui Bagaimana Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan UMKM. Permasalahan umum yang terjadi adalah Kurang tersedianya wadah sebagai tempat pemasaran produk UMKM. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam tentang Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan UMKM di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimana fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Karangawen dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Karangawen. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan atau mendefinisikan Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan UMKM di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Studi dalam penelitian ini yaitu Studi *Governing*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam Penelitian ini Sumber data dipilih secara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, dengan mengelompokkan Informan serta memberikan pertanyaan sesuai dengan kapasitasnya, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objek atau situasi sosial yang diteliti.

Hasil Penelitian menunjukkan permasalahan terkait Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan UMKM, ialah Perhatian Pemerintah Kalurahan Karangawen dalam pengembangan UMKM belum Optimal. Dengan kata lain Fasilitasi Pemerintah Desa/Kalurahan Karangawen tidak maksimal, kemudian terdapat juga beberapa hambatan dalam pengembangan UMKM salah satunya seperti kurangnya dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan Karangawen untuk mendukung perkembangan UMKM di Kalurahan Karangawen. Adapun permasalahan lain yang menyebabkan lambatnya perkembangan UMKM di Kalurahan Karangawen yakni kurangnya kesadaran dan kekompakan dari pelaku UMKM dalam menjalankan usaha UMKM.

Kata Kunci : Tindakan Pemerintah, Pengembangan UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asia tenggara merupakan bagian tenggara dari benua Asia. Di Asia Tenggara didominasi oleh negara-negara berkembang yang termasuk negara Indonesia. Adapun pengembangan perekonomian negara-negara di Asia Tenggara memiliki kaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan dalam suatu negara yaitu bagaimana efek atau dampak terhadap perkembangan ekonomi dari pembangun yang dicapai oleh Negara tersebut. Maka dari itu, usaha pengembangan perekonomian yang dibangun oleh suatu negara terutama negara di Asia Tenggara memiliki tujuan salah satunya adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk yang tergolong besar tersebut tentunya sangat berdampak pada tingginya ataupun meningkatnya angka kemiskinan dan jika tidak dibarengi dengan solusi yang bertujuan sebagai peningkatan kualitas penduduk maka peningkatan angka kemiskinan akan semakin pesat.

Seperti yang kita ketahui sekarang ini di Indonesia, pemerintah mempunyai peran yang cukup besar dalam pengembangan perekonomian masyarakat Indonesia. Suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk nyata yang diharapkan mampu menciptakan

solusi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia guna mengurangi angka kemiskinan di Indonesia saat ini. Dalam rangka memperbaiki perekonomian masyarakat Indonesia hendaknya dimulai dari desa. pengembangan ekonomi yang dilakukan dari desa bertujuan agar bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa. pengembangan ekonomi desa dilakukan harus atas campur tangan pemerintah desa yang akan bekerjasama dengan masyarakat desa agar dapat memaksimalkan potensi tersebut. Pemerintah desa memiliki kewenangan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa untuk kepentingan perekonomian masyarakat dan perkembangan pembangunan desa. Dalam hal ini pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan inovasi guna memanfaatkan potensi yang dimiliki desa tersebut untuk mengembangkan perekonomian masyarakat desa salahsatunya adalah meningkatkan dan mendukung usaha masyarakat desa seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam desa tersebut. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah desa tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun penetapan peraturan desa dalam UU No 6 Tahun 2014 ini dimaksudkan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM di Indonesia dipandang sebagai wadah yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang dirancang oleh pemerintah ataupun pelaku yang menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM yang dijalankan oleh masyarakat memiliki dampak yang sangat baik terhadap suatu daerah ataupun desa terlebih khusus sebagai pendongkrak pertumbuhan perekonomian masyarakat sehingga UMKM dianggap sebagai salah satu penopang perekonomian di Indonesia saat ini.

Pencapaian tujuan UMKM sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tentunya tidak terlepas dari dukungan ataupun peran dari Pemerintah Desa/Kalurahan. Peran ataupun dukungan dari pemerintah Kalurahan terhadap perkembangan UMKM tersebut diharapkan memiliki kontribusi secara langsung. Dalam hal ini Pemerintah Kalurahan perlu melakukan fasilitasi sehingga bentuk dukungan dan peran pemerintah Kalurahan tersebut bukan hanya sekedar bentuk perhatian saja melainkan terdapat fasilitasi sehingga Pemerintah Kalurahan betul-betul berkontribusi terhadap pembangunan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tersebut. adapun bentuk fasilitasi atau dukungan dari Pemerintah Kalurahan terhadap perkembangan UMKM tersebut dapat dilakukan dengan berbagai usaha seperti mengadakan sosialisasi serta pelatihan kepada masyarakat guna meningkatkan

kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengolah potensi terlebih khusus potensi sumber daya alam yang dimiliki, Selain itu juga Pemerintah Kalurahan menyediakan pinjaman atau kredit sebagai modal usaha masyarakat dan masih banyak bentuk fasilitasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan guna mendukung perkembangan UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berjalan di Indonesia sudah banyak berkembang diwilayah Desa dan Kalurahan, salah satunya adalah Kalurahan Karangawen.

Kalurahan Karangawen merupakan salah satu Kalurahan yang terletak di Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Karangawen memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah seperti singkong, padi, jagung, pisang, dan lain sebagainya. Adanya potensi sumber daya alam yang terdapat di Kalurahan Karangawen tersebut membuka peluang kepada beberapa masyarakat Kalurahan untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Potensi-potensi sumber daya alam yang terdapat di Kalurahan Karangawen tersebut dikelola oleh beberapa masyarakat pelaku UMKM menjadi makanan ringan seperti keripik singkong, keripik pisang dan peyek. Minat yang besar dari pelaku UMKM untuk memajukan bisnisnya dalam bidang makanan ringan tersebut menjadikan nilai tambah bagi pelaku UMKM di Kalurahan Karangawen dan berharap dengan usaha yang sedang dijalankan memberikan dampak yang positif terlebih khusus mampu mendorong perekonomian pelaku UMKM tersebut. Akan tetapi

dalam berjalannya UMKM yang terdapat di Kalurahan Karangawen tersebut terdapat beberapa hambatan atau kendala yang menyebabkan sulitnya perkembangan UMKM tersebut. Adapun hambatan atau kendala tersebut seperti pada bagian pemasaran, yang dimana setelah diproduksi menjadi makanan ringan para pelaku UMKM kesulitan dalam memasarkan hasil produksi tersebut. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurang tersedianya wadah yang dapat digunakan sebagai tempat untuk penjualan hasil produk tersebut sehingga hasil produksi dari UMKM tersebut hanya disalurkan di beberapa warung yang terdapat di Kalurahan Karangawen. Para pelaku UMKM juga belum memanfaatkan media sosial sebagai salah satu tips penjualan dan sebagai lahan promosi sehingga pendistribusian hasil produksi UMKM tersebut belum mencapai hasil yang maksimal. Selain itu terdapat permasalahan lain yang menjadi hambatan atau kendala dalam perkembangan UMKM di Kalurahan Karangawen seperti bentuk kemasan masih sederhana yang masih dibungkus dengan kemasan plastik polos dan tanpa label. sehingga hasil produk UMKM di Kalurahan Karangawen tersebut masih kalah saing dengan hasil produk luar lainnya.

Pemerintah Kalurahan Karangawen mendukung penuh bentuk usaha yang dijalankan oleh masyarakat sebagai pelaku UMKM dan telah berupaya berperan dalam membantu pelaku UMKM tersebut. Untuk mendukung perkembangan UMKM tersebut, Pemerintah Kalurahan Karangawen telah mengadakan kegiatan berupa pendampingan langsung dari pihak UMKM. Selain itu untuk saat ini Pemerintah Kalurahan Karangawen juga telah

membentuk kepengurusan UMKM tersebut. Akan tetapi peran Pemerintah Kalurahan Karangawen sebagai upaya untuk dukungan perkembangan UMKM yang sedang berjalan tersebut belum mencapai hasil yang maksimal terlebih khusus dalam menciptakan solusi agar persoalan yang menjadi hambatan akan berkembangnya UMKM yang sedang berjalan di Kalurahan Karangawen tersebut dapat terpecahkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat masalah sebagai berikut: “Bagaimana fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Karangawen dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Karangawen?”

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini juga memiliki dua manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu melalui penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk peneliti lain terkait upaya pengembangan UMKM

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan akan memberi nilai positif kepada Pemerintah Kalurahan Karangawen terkait dengan upaya ataupun strategi untuk pembangunan UMKM yang sedang berjalan di Kalurahan Karangawen.

E. Literatur Review

Pada bagian ini penulis akan mencantumkan beberapa hasil literatur review yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa literatur review yang akan dicantumkan ini merupakan hasil penelitian terdahulu, Adapun literatur review tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Marantika Fibrianti Sumadi dan Ananta Prathama (Limbah Kayu Jati Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Bojonegoro).

Penelitian Marantika Fibrianti Sumadi dan Ananta Prathama (2021) berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) “*handycraft*” Limbah kayu jati sebagai

produk unggulan Kabupaten Bojonegoro. Latar penelitian ini mendalami peran pemerintah dalam pengembangan UMKM menggunakan teori Gede Diva cukup berperan. Dalam teori Gede Diva menjelaskan bahwa dalam pengembangan UMKM yang optimal dan efektif maka pemerintah memiliki peran yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif Deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dengan mencermati dokumentasi yang ada dengan menggunakan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menerapkan proses coding, seting (ranah) dan orang (partisipan).

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah yaitu pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai fasilitator yaitu melalui berbagai kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas sarana dan prasarana baik itu tempat pelatihan, tempat pameran perajin, handycraft kayu jati dan gedung pameran yaitu Galeri Dekranasda Bojonegoro sebagai pusat promosi produk-produk unggulan UMKM. Selanjutnya peran pemerintah sebagai regulator yaitu merencanakan, melaksanakan dan evaluasi suatu kebijakan atau peraturan. Terakhir peran pemerintah sebagai katalisator yaitu melalui pemberian bantuan permodalan yang sudah tidak berjalan melainkan pemerintah masih menjembatani para pelaku UMKM dalam mencari modal ke bank atau BUMD, pemberian bantuan teknologi juga sudah tidak ada, dan penggunaan anggaran dana

dari APBD yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan UMKM sehingga peran pemerintah daerah sebagai regulator sudah cukup berperan.

Peneliti menyimpulkan bahwa salah satu *Literature Riview* yang pertama ini, pada penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) “handycraft” Limbah kayu jati sebagai produk unggulan Kabupaten Bojonegoro, yakni peran pemerintah sangat diperlukan dan juga berperan besar dalam pengembangan UMKM dengan maksud agar proses pengembangan UMKM tersebut dapat berjalan dengan baik.

2. Irma Anita Dinita, Sampara Lukman dan Kusworo (*Penelitian Program Magister terapan studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintah Dalam Negeri*)

Penelitian Irma Anita Dinita, Sampara Lukman dan Kusworo (2021) Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dodol Kentang Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Lubuknagandang Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Latar dari penelitian ini mendalami tentang pemberdayaan UMKM Dodol Kentang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Lubuknagandang Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci belum optimal, hal tersebut tampak pada aspek pemberdayaan UMKM Dodol Kentang yang meliputi Fase Inisial, Fase Partisipatoris dan Fase Emansipatoris.

menunjukkan bahwa tiga (3) fase, yaitu: Fase Inisial, bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci telah mengupayakan situasi perekonomian yang stabil dan mendorong pengembangan potensi yang dimiliki UMKM Dodol Kentang pada aspek varian maupun pemasaran meskipun belum sepenuhnya para pengusaha mampu melaksanakannya. Fase Partisipatoris, bahwa Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci telah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepada para Pembuat Dodol Kentang demi peningkatan kualitas SDM para pembuat Dodol Kentang sehingga mampu menemukan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi secara lebih mandiri meskipun belum seluruh pelaku usaha Dodol Kentang menerima pendidikan dan pelatihan tersebut. Fase Emansipatoris, bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci belum menetapkan produk hukum daerah mengenai Dodol Kentang, sebagai wujud perlindungan atas produk Lokal serta melakukan pengawasan kepada para pelaku usaha Dodol Kentang sehingga terhindar dari monopoli dan mampu mengembangkan usahanya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dalam penelitian kualitatif diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, kuesioner, rekaman video/audio, data dari buku, data dari web), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya yang diinginkan terpenuhi.

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan mengenai Peranan Pemerintah Dalam

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, bahwa program yang meningkatkan perekonomian keluarga yaitu peneliti menemukan bahwa program UMKM dapat memberdayakan potensi yang ada pada masyarakat khususnya ibu-ibu dan pengangguran sehingga masyarakat menjadi kreatif dan dapat menciptakan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran di Desa Laut Dendang. Kegiatan BUMDes di pedesaan menciptakan *multiplier effect*, terutama dalam bidang ekonomi dimana tercipta banyaknya lapangan pekerjaan dan peluang dalam berusaha. Suatu peluang usaha tersebut menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat yang mampu menangkap peluang usaha yang potensial dikembangkan menjadi suatu kegiatan usaha yang nyata. Oleh karena itu pendapatan masyarakat menjadi bertambah dan pengangguran berkurang sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Peneliti menyimpulkan bahwa salah satu *Literature Riview* yang kedua ini, pada penelitian Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dodol Kentang Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Lubuknagodang Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, yakni pemberdayaan UMKM ini sangat dibutuhkan dikarenakan pemberdayaan UMKM ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta dapat mengurangi pengangguran di masyarakat.

3. Wury Hartanti dan Christiawan Hendatmoko (*Program Studi SI Manajemen STIE Surakarta*)

Penelitian Irma Anita Dinita, Wury Hartanti dan Christiawan Hendatmoko (2021) Peran Pemerintah Kelurahan Mangkubumen Dalam Pengembangan UMKM. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran Pemerintah Kelurahan Mangkubumen. Dalam pengembangan UMKM dibagi menjadi tiga cara, yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. Latar dari penelitian ini yakni menjelaskan perbuatan pemerintah Kelurahan Mangkubumen dalam rangka untuk mengembangkan UMKM di Kelurahan Mangkubumen.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data melalui Informan dengan melakukan wawancara, dokumentasi dengan berkaitan dengan penelitian ini, baik berupa buku, peraturan-peraturan, bahan bacaan lainnya yang dapat digunakan dan yaitu tempat, dalam penelitian ini tempat yang dimaksud dapat berupa lokasi usaha mikro kecil menengah Dodol Kentang di desa Lubuknagandang, Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja.

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan mengenai Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pengembangan UMKM. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran Pemerintah Kelurahan Mangkubumen menggunakan tiga (3) cara yakni pengembangan UMKM dengan menggunakan langkah sebagai berikut:

Enabling atau menumbuhkan iklim usaha dilakukan dengan cara menyalurkan dana BAZNAS serta memanfaatkan program Mangku Lawren, bantuan sarana dan prasarana, penyebarluasan informasi usaha, menjalin kemitraan dengan usaha berbasis digital, kemudahan perizinan usaha, serta bantuan promosi usaha. Indikator yang belum dilaksanakan adalah dukungan kelembagaan. Empowering atau penguatan potensi usaha dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi. Protecting atau upaya dalam melindungi usaha dilakukan dengan cara mencegah persaingan usaha yang tidak seimbang. Faktor pendukung pengembangan UMKM terdiri dari jiwa kewirausahaan yang tinggi, bantuan modal dan peralatan, serta kebijakan pemerintah. Sedangkan faktor penghambatnya terdiri dari kurangnya modal dan pemasaran.

Peneliti menyimpulkan bahwa salah satu *Literature Riview* yang Ketiga ini, pada penelitian Peran Pemerintah Kelurahan Mangkubumen Dalam Pengembangan UMKM, yakni peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan UMKM di Kalurahan Mangkubumen. Hal ini dikarenakan UMKM tersebut berada di bawah naungan dari Pemerintah Kalurahan itu sendiri, selain itu tujuan dari regulasi tentang UMKM ini guna untuk meningkatkan pendapatan dari Masyarakat yang dimana peningkatan pendapatan ini termasuk dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terkait dengan poin Pemberdayaan Masyarakat Desa.

4. Syahputri Siregar dan Tomi Jaffisa (*Universitas Dharmawangsa*)

Penelitian Syahputri Siregar dan Tomi Jaffisa (2021). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Laut Dendang. Hasil dari penelitian ini bahwa program yang meningkatkan perekonomian keluarga yaitu program UMKM dapat memberdayakan potensi yang ada pada masyarakat khususnya ibu-ibu dan pengangguran sehingga masyarakat menjadi kreatif dan dapat menciptakan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran di Desa Laut Dendang.

Jenis peneliian yang digunakan adalah kualitatif.Data dalam penelitian kualitatif diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, kuesioner, rekaman video/audio, data dari buku, data dari web), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya yang diinginkan terpenuhi.

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan mengenai Peran Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Dengan adanya Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Desa Laut Dendang maka Pemerintah Desa bisa terbantu dalam mengatasi pengangguran yang ada di Desa Laut Dendang, akan tetapi dalam menjalankan usahanya para pelaku Usaha Kecil dan Menengah masih memiliki beberapa hambatan seperti tidak adanya modal usaha yang cukup, kurangnya sosialisasi, pelatihan untuk meningkatkan produktifitas dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumber daya alam dan

daya produksi lainnya yang dapat menjadi penghambat perkembangan Usaha Kecil dan Menengah di Desa Laut Dendang yang mengakibatkan terpuruknya perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah wilayah desa Laut Dendang khususnya Kecamatan Percut Sei Tuan. Untuk mengatasi beberapa hambatan yang dialami Usaha Kecil dan Menengah pemerintah Desa Laut Dendang memberikan pinjaman kepada masyarakat selain itu juga Pemerintah Desa Laut Dendang Juga memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Peneliti menyimpulkan bahwa salah satu *Literature Riview* yang Keempat ini, Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Laut Dendang. Yakni peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam proses Pemberdayaan UMKM di Desa Dendang. Hal ini dikarenakan peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam Pemberdayaan serta pengembangan UMKM. Tujuan dari Pemberdayaan UMKM tersebut untuk mensejahterakan masyarakat Desa Dendang itu sendiri.

5. Padma Lalita Nur Priyani (*Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FIS Universitas Negeri Yogyakarta*)

Padma Lalita Nur Priyani (2021) Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan UMKM Oleh Pemerintah Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Keji melakukan upaya pemberdayaan UMKM melalui beberapa program pada tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019,

serta terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan UMKM melalui dana desa berupa kendala internal dan kendala eksternal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang dimana teknik penelitian ini menggunakan teknik Observasi, Wawancara dan pemilihan Lokasi Penelitian. Adapun Subjek dari Penelitian ini yakni Pemerintah Desa Keji dan pelaku UMKM di Desa Keji. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang sudah peneliti lakukan mengenai Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Dalam Pemberdayaan UMKM di Desa Keji, Pemerintah Desa mengalami Kendala, adapun kendala yang dihadapi yakni, Kendala internal meliputi kendala perencanaan program karena keterbatasan informasi dan kendala birokratif karena perubahan kebijakan pemerintah desa. Selanjutnya, kendala eksternal berupa kendala sumber daya pelaku usaha, meliputi kurang terampilnya pelaku usaha dalam penggunaan teknologi informasi untuk kepentingan usaha, pelaku usaha belum mampu menyusun proposal bantuan dana untuk perkembangan usaha, dan kurangnya peran organisasi yang terlibat Musrembangdes dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Pemerintah Desa Keji mengatasi kendala yang dihadapi dengan beberapa upaya, salah satunya dengan menyusun strategi ekonomi dalam RPJMDesa Keji Tahun 2020-2026. Selain itu Pemerintah Desa Keji telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pemberdayaan UMKM dalam bentuk pembangunan

sarana prasarana dan fasilitas yang mendukung iklim usaha yang baik meliputi, program rehabilitasi kios Desa Keji yang dilaksanakan ditahun anggaran 2018 dan 2019 dengan tujuan untuk memperluas jangkauan pasar pelaku UMKM dengan berbagai kemudahan. pembentukan dan pengembangan BUMDesa Keji ditahun anggaran 2018 dan 2019 sebagai wadah bagi pelaku UMKM dalam mempermudah proses administrasi, permodalan, serta pemasaran. Upaya selanjutnya adalah pengadaan *smart city* ditahun anggaran 2019 yang bertujuan untuk menyikapi era digital serta memperluas jangkauan pemasaran pelaku UMKM melalui pasar online. Namun seluruh upaya tersebut belum dapat diterapkan secara maksimal karena masih dalam tahan pengembangan.

Peneliti menyimpulkan bahwa salah satu *Literature Riview* yang Kelima ini, tentang Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Dalam Pemberdayaan ini Pemerintah Desa mengalami kendala, adapun kendala yang dihadapi yakni kendala internal dan kendala eksternal. Selain adanya kendala, pemerintah Desa memiliki peran yang begitu besar dalam proses pemberdayaan UMKM tersebut, dengan mengambil langkah menggunakan Dana Desa dalam Pemberdayaan UMKM di Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

Beberapa penelitian diatas merupakan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan yaitu terkait peran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap usaha dari masyarakat desa terlebih khusus terhadap pembangunan

UMKM. Akan tetapi perbedaan kelima penelitian yang telah dicantumkan diatas dengan penelitian saat ini terletak pada fokus utama penelitian. Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM, Selain itu dalam penelitian ini akan mengikuti panduan dari salah satu perspektif yang terdapat dalam *Mazhab Timoho* yaitu perspektif *Governing*. Dalam perspektif *Governing* mengkaji tentang perbuatan pemerintah. Hal tersebut tentunya berkaitan penelitian ini yaitu fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM.

F. Kerangka Teori

Kerangka konsep ini disusun dalam rangka memberi jawaban secara teoritis terhadap pertanyaan penelitian serta menjadi acuan dalam melakukan studi di lapangan. Penulis akan melakukan tinjauan pustaka terhadap studi-studi pengembangan UMKM dan Fasilitasi Pemerintah dengan memakai pintu masuk Konsep *Governing* (memusatkan perhatian pada perbuatan pemerintah) dalam melihat Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Kalurahan proses dan cara terhadap unsur-unsur berbeda untuk melahirkan kebijakan, hukum, dan lainnya terkait pengembangan UMKM:

1. Governing

Dalam penelitian ini pembahasan tentang fasilitasi pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM dipandu oleh salah satu perspektif dari *Mazhab Timoho* yakni perspektif *Governing* Atau disebut

perbuatan pemerintah. Perspektif *Governing* atau perbuatan pemerintah ini mengkaji beberapa hal yakni meliputi mengkaji aktifitas pemerintah teknologi pemerintah, peraturan perundang-undangan serta kebijakan dari pemerintah maka dari itu perspektif *Governing* melekat pada pemerintah dan pemerintah mempunyai otoritas yang menjadi sebuah legitimasi untuk menyelenggarakan pemerintahan. Perspektif *Governing* dimaknai sebagai suatu usaha atau upaya untuk mengatur dan mengurus yang harus meliputi tahap proses, fungsi dan hasil. Dalam perspektif *Governing* pembentukan hukum dan kebijakan merupakan perbuatan pemerintah yang penting maka dari itu perspektif *Governing* pula memuat proses politik, hukum dan administrasi.

2. Desa/Kalurahan

Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, *Deci* yang berarti Tanah Kelahiran. Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Medan: Bitra Indonesia, 2013:2)” Desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa Desa identik dengan kehidupan tradisional dan kesederhanaan yang dimiliki. Istilah Desa dan atau Kalurahan hanya dikenal di Pulau Jawa, sedangkan di luar Pulau Jawa misalnya Papua sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa desa sangat beraneka ragam yaitu “Kampung”. Sesuai dengan asal mula terbentuknya area Desa tersebut, baik berdasarkan pada genealogis atau ikatan teritorial dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional

tertentu. Namun di pulau Jawa sendiri sekarang sudah menyebut Desa dengan sebutan yang baru yaitu Kalurahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Desa menurut Sutardjo Hadikusuma adalah suatu kesatuan hukum masyarakat yang bertempat tinggal dalam lingkungan yang sama dan berkuasa untuk mengadakan pemerintahan sendiri. Desa biasanya terdiri dari tempat kediaman masyarakat atau terdiri dari pedukuhan-pedukuhan yang tergabung menjadi induk desa. (Darsono Wisadirina, 2004:18) Konstruksi demikian lebih sejalan dengan ideologi tipologi desa yang bersifat lokalis ekstensialis dibandingkan tipologi orientalis modernis dan struktural radikal. Tipologi desa ini menjadi dasar argumen bahwa desa merupakan situs otentisitas dan basis peradaban negara bangsa modern. Pemahaman tersebut akhirnya membawanya kepada pandangan bahwa demokrasi desa merupakan demokrasi komunitarian (kebaikan bersama dan musyawarah) (Sutoro Eko, 2018:4). Oleh sebab itu, tipologi desa kiranya menentukan arah pembangunan desa yang dituju dan keseluruhan aktivitasnya, hingga pada persoalan demokrasi desa.

Kalurahan adalah Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan dan Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Dan Staf.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan Pasal 1 ayat 14, Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan Pasal 15 juga menjelaskan Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kalurahan. Kebijakan yang telah hadir tersebut disusun guna memperjelas kewenangan Kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan di Kalurahan.

Berlakunya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan, menyebutkan bahwa Desa-Desa di DIY saat ini di sebut dengan Kalurahan. Seperti yang di sebutkan di dalam Pergup DIY Nomor 25 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri

atas gabungan beberapa padukuhun yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

Pergantian tersebut bertujuan untuk mengembalikan dan melestarikan susunan dan bentuk asli pemerintahan di DIY. Dari pergantian Desa menjadi Kalurahan sehingga penyebutan Pemerintah Desa dan unsur-unsur yang membantu pemerintah desa dalam menjalankan urusan pemerintahan di desa menjadi berganti. Di dalam Kalurahan di pimpin oleh Pemerintah Desa yang saat ini di sebut dengan Lurah dan di bantu oleh Pamong Kalurahan antara lain Sekertariat, Pelaksana teknis dan Pelaksana kewilayahan. Seperrti yang di sebut dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan menyatakan bahwa :

Pasal 5

- 1) *Bahwa Penyelenggaraan sebagian urusan Keistimewaan di tingkat Kelurahan wilayah Kota Yogyakarta dilakukan oleh Lurah.*

Pasal 6

- 1) *Penyelenggaraan sebagian urusan Keistimewaan di Kalurahan wilayah Kabupaten dilaksanakan oleh Kalurahan,*
- 2) *Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Lurah dan Pamong Kalurahan,*

3) *Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas. Sekretariat, Pelaksana teknis dan Pelaksana kewilayahan. Sekretariat yang di sebut dengan Carik, Pelaksana teknis yang bertugas antara lain melaksanakan urusan tata usaha dan umum yang di pimpin oleh Kepala Urusan Tata Laksana, melaksanakan urusan keuangan yang di Pimpin oleh Kepala Urusan Danarta dan melaksanakan urusan perencanaan yang di pimpin oleh Kepala Urusan Pangripta.*

Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik oleh pernyataan diatas bahwa, Pelaksana kewilayahan disebut padukuhan dipimpin oleh Dukuh. Hal tersebut di perkuat dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf (a) dipimpin oleh Carik yang merupakan sebutan dari Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf Sekretariat. Serta pada Pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa tata laksana, melaksanakan urusan tata usaha dan umum, dipimpin Kepala Urusan Tata Laksana; danarta, melaksanakan urusan keuangan, dipimpin Kepala Urusan Danarta; dan pangripta, melaksanakan urusan perencanaan, dipimpin Kepala Urusan Pangripta. Dalam pelaksana teknis masih terdapat unsur-unsur pelaksana tugas operasional antara lain Jagabaya, Ulu-ulu dan Kamituwa yang di sebutkan

di dalam Pasal 8 ayat (2) bahwa Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:

1. Keamanan yang merupakan sebutan dari Seksi Pemerintahan, dipimpin oleh Jagabaya;
2. Kemakmuran yang merupakan sebutan dari Seksi Kesejahteraan, dipimpin oleh Ulu-ulu; dan
3. Sosial yang merupakan sebutan dari Seksi Pelayanan, dipimpin oleh Kamituwa.

Sedangkan Pelaksana kewilayahan sebagai salah satu unsur pembantu Lurah yang berwilayah di padukuhan di dalam Pergub tersebut tertuang pada Pasal 9 Ayat (2) Satuan tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Padukuhan, yang dipimpin oleh Dukuh. Namun, dari pergantian nama tersebut tidak merubah jalannya atau kinerja pemerintahan di kalurahan. Dalam pelaksana teknis

Dalam UU Keistimewaan memberikan penambahan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Keistimewaan antara lain Kebudayaan, Pertanahan dan Tata ruang yang di laksanakan oleh Jagabaya, Ulu-ulu dan Kamituwa. Hal tersebut di sebutkan di dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan Pasal 5 ayat (3) Tugas dan fungsi urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang kebudayaan, pertanahan; dan tata ruang. Serta dalam Pasal 10 ayat (3), (4)

dan (5) yang menyebutkan bahwa (3) Jagabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dan melaksanakan urusan Keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang. Pada ayat (4) menyebutkan bahwa Ulu-ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dan melaksanakan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan. Serta pada ayat (5) menyebutkan bahwa Kamituwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.

Di dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 72 ayat (1) dijelaskan bahwa kewenangan Desa telah diperkuat dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatannya, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, Desa diberikan sumber pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang terdiri dari hasil usaha, aset desa, partisipasi dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Kedua Dana Desa dari APBN. Ketiga, Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak dan retribusi Kabupaten/Kota yang dimana setiap Desa mendapatkan jatah minimal 10%. Keempat, alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Setiap Desa mendapatkan paling sedikit 10% dari DBH dan Dana Alokasi Umum (DAU). Kelima, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD

Kabupaten/Kota. Keenam hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Ketujuh, lain-lain dari dari pendapatan desa yang sah.

Hal yang sama juga ditegaskan kembali di dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa pendapatan desa yakni semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa”. Pendapatan Desa tersebut terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa),

Pendapatan Asli Desa (PADesa) merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi pendapatan yang ada di desa seperti hasil usaha desa, hasil aset, dan lain-lain.

b. Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain, seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, transfer dari pemerintah provinsi, dan transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan transfer terdiri dari Dana Desa (DD) , Bagi Hasil Dari Pajak Daerah Kabupaten/ Kota dan Retribusi Daerah (BHPRD), Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten/ kota.

c. Pendapatan Lain-Lain

Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah. “Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1).

3. Fasilitasi Pemerintah

Fasilitasi adalah segala sesuatu yang menjadi sarana pendukung dalam berbagai aktivitas untuk mempermudah kegiatan UMKM yang ada di Kalurahan Karangawen. Dalam beberapa definisi dikatakan bahwa mempermudah adalah membebaskan kesulitan dan hambatan, membuatnya menjadi mudah, mengurangi pekerjaan, membantu. Menurut Sumpeno (2009) fasilitasi merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan oleh pendamping dalam memberdayakan masyarakat. Istilah fasilitasi banyak digunakan di kalangan praktisi dan aktivis pembangunan masyarakat untuk menyatakan suatu bentuk intervensi atau dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok atau kelembagaan masyarakat. Dalam konteks pembangunan istilah fasilitasi dapat dikaitkan dengan pola pendampingan, pendukung atau bantuan bagi masyarakat. Pemerintah dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan/exercising power (the international Encyclopedia of Social Science, 1847). Aktivitas pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan Negara kemudian menjadi kewenangan utama, baik secara internal maupun eksternal. Dalam keadaan demikian, Max Weber menyimpulkan bahwa pemerintah secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam sesuatu wilayah tertentu. Dalam keseluruhan sistem tersebut, pemerintah menurut Apter merupakan satuan yang paling umum untuk melakukan tanggung jawab tertentu guna mempertahankan sistem

serta melakukan monopoli praktis lewat kekuasaan secara paksa (Muhadam Labolo 2006: 16-17).

Pemerintah dapat dilihat pada dua sudut, yaitu pemerintahan dalam arti fungsi yaitu kegiatan yang mencakup aktifitas pemerintah dan kedua, dalam arti organisasi yaitu kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintah. Kemudian Bagir Manan menguraikan pemerintah dan pemerintahan dalam arti administrasi, serta kewenangan administrasi. Menurutnya pemerintah dalam arti luas, mencakup semua alat kelengkapan Negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, yudikatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara. Tindakan badan eksekutif atau yudikatif dianggap sebagai tindakan Negara. Secara keseluruhan, fungsi pemerintahan terdiri dari berbagai macam tindakan pemerintah, seperti keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum dan tindakan nyata (Dr. H. A. Muin Fahmal 2006: 26-27). Pemerintahan dibedakan menjadi dua, yaitu, pertama, pemerintahan dalam arti luas, yaitu pemerintahan yang terdiri dari tiga kekuasaan yang masing-masing terpisah satu sama lain. ketiga kekuasaan itu adalah: kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, pemerintahan kekuasaan itu berdasarkan teori trias politika dari Montesquieu. kedua, pemerintahan dalam arti sempit ialah badan pelaksana kegiatan eksekutif saja tidak termasuk badan kepolisian, peradilan dan badan perundang-undangan. pemerintahan dalam arti sempit

itu dapat disebut dengan istilah lain, yaitu "administrasi negara". pemerintah adalah subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban.

4. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Keberandaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau disingkat UMKM ini dianggap sangat penting karena UMKM dapat berperan sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat di Indonesia saat ini. Hal tersebut dikarenakan UMKM merupakan suatu lahan usaha untuk masyarakat sehingga masyarakat sebagai pelaku UMKM dapat melakukan aktifitas perekonomian untuk meningkatkan pendapatan. Selain itu juga UMKM sebagai lahan usaha dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak sehingga berkontribusi terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia yang saat ini memiliki jumlah penduduk yang tergolong sangat besar. Dengan kata lain UMKM dapat menjadi salah satu solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia khususnya masalah kemiskinan dan pengangguran. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah atau biasa disingkat UMKM telah diatur dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan secara rinci pengertian dari Usaha Mikro, kecil, dan Menengah.

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil maupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi UMKM yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 diatas maka dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan salah satu bentuk usaha terkait ekonomi produktif yang tidak memiliki keterkaitan dengan perusahaan ataupun usaha besar/menengah lainnya yang dijalankan oleh individu atau dijalankan oleh suatu badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana yang telah ditentukan sebagai UMKM. Selain itu agar bisa diketahui jenis usaha apa yang dijalankan maka terlebih dahulu memperhatikan kriteria-kriteria dari UMKM itu sendiri. Kriteria-kriteria ini penting diperhatikan untuk urusan surat ijin

usaha kedepannya serta sebagai penentu besaran pajak yang akan dibayar oleh masyarakat sebagai pelaku UMKM. Adapun dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 telah mengatur kriteria secara keseluruhan baik Usaha Mikro, Usaha Kecil, ataupun Usaha Menengah.

- 1) Usaha Mikro dengan aset maksimal 50 Juta dan dengan omset Maksimal 300 Juta
- 2) Usaha Kecil dengan aset maksimal lebih dari 50 Juta sampai 500 Juta dan dengan omset lebih dari 300 Juta sampai 2,5 Miliar
- 3) Usaha Menengah dengan aset lebih dari 500 Juta sampai 10 Miliar dengan omset 2,5 Miliar sampai 50 Miliar.

Kontribusi dari UMKM sangat penting terutama bagi perekonomian masyarakat Indonesia, maka dari itu untuk mencapai peningkatan perekonomian maka pengembangan pada sektor UMKM sangat diperlukan. Pengembangan UMKM ini akan berjalan dengan baik dengan adanya fasilitasi sebagai dukungan dari pemerintah kalurahan dengan melakukan berbagai upaya seperti salah satunya yakni menyediakan fasilitas keperluan sebagai aspek penunjang dalam pelaksanaan usaha yang dijalankan sehingga dengan tersedianya fasilitas yang diperlukan tersebut diharapkan mampu menghasilkan produk yang berkualitas sehingga dapat bersaing dengan produk-produk lainnya. Pembangunan masyarakat, merupakan suatu proses dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan

kebudayaan dan mengintegrasikan masyarakat didalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional (Luz. A. Einsiedel,1968:9). Terkait pengembangan UMKM telah diatur juga dalam UU No. 20 Tahun 2008 terkait pengembangan UMKM dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan
- b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial
- c. Membentuk dan mengembangkan Lembaga Pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Berdasarkan tiga hal tersebut maka perlu peningkatan kualitas pada aspek sumber daya manusia karena merupakan salah satu subyek yang paling penting terkait upaya pengembangan UMKM sehingga mampu menciptakan masyarakat dengan wirausaha yang mandiri sehingga tetap berjalan dalam kondisi apapun dan mampu menghadapi resiko sehingga usaha yang sedang dijalankan tetap berjalan dengan baik. Berdasarkan pembahasan diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam upaya pengembangan UMKM dibutuhkan peran dari Pemerintah. Berkaitan dengan pengembangan UMKM yang terdapat di Kalurahan Karangawen, Pemerintah Kalurahan Karangawen telah melakukan beberapa upaya termasuk salah satunya yakni mengalihkan Sebagian Dana Desa untuk

menunjang keperluan dari masyarakat sebagai pelaku UMKM yang terdapat di Kalurahan Karangawen. Akan tetapi perlu adanya inovasi yang lain dari Pemerintah Kalurahan Karangawen untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pelaku UMKM di Kalurahan Karangawen terlebih khusus terkait permasalahan pemasaran hasil produksi dari UMKM yang sampai saat ini belum secara maksimal dijalankan.

G. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian ini ialah:

1. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM.

H. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses mencari fakta yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data yang berkaitan. Untuk mencapai tujuan dalam penelitian, proses pengumpulan dan analisis data ini dilakukan secara sistematis dan tentunya logis agar penelitian tersebut bisa dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu metode yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong,2005:6). Metode kualitatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif eksploratif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang berusaha menggali tentang sebab-sebab terjadinya sesuatu, penelitian yang bersifat eksploratif juga berusaha menggali pengetahuan baru untuk mengetahui suatu permasalahan yang sedang terjadi (Suharsimi Arikunto, 2010:14). Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif eksploratif yaitu untuk menggali informasi dan mengetahui tentang Fasilitas Pemerintah Kelurahan Dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Objek penelitian

Untuk mencapai tujuan dari sebuah penelitian maka dalam penelitian tersebut harus memiliki objek yang akan diteliti, objek tersebut akan dijadikan sebagai sasaran dalam penelitian tersebut. Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti (Supranto,2000:21). Para ahli lain juga mengungkapkan bahwa objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah (Anto Dayan,1986:21).

Adapun hal yang menjadi objek dalam dalam penelitian ini yakni UMKM yang dikembangkan oleh Pemerintah Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3) Subjek Penelitian

Subjek penelitian diartikan sebagai elemen benda, individu maupun organisme sebagai sumber informasi yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian (Muhammad Idrus,2009). Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang diteliti maka seorang peneliti diharapkan memperhatikan ketepatan dalam pemilihan informan sebagai pemberi informasi sehingga informan yang telah dipilih harus memiliki kaitan erat dengan apa yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yakni teknik penentuan subjek penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri khusus yang sesuai dengan apa yang diteliti. Adapun jumlah subjek dalam penelitian yakni 8 (delapan) orang sebagai informan yang terdiri dari Lurah, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kamituwo, Pelaku UMKM 4 Orang.

4) Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan Teknik.

a. Observasi

Untuk memperoleh data dan Informasi maka akan dilakukan observasi yakni dengan melakukan pengamatan atau meninjau secara langsung pada lokasi penelitian yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini objek yang akan diamati atau diobservasi oleh peneliti yakni UMKM beserta masyarakat sebagai pelaku UMKM yang dikembangkan oleh Pemerintah Kalurahan Karangawen.

b. Wawancara

Untuk menggali dan memperoleh data yang tepat dalam penelitian kualitatif, tentunya peneliti akan melakukan langkah yang akan mencakup proses tanya jawab terkait apa yang sedang diteliti kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Teknik wawancara dapat diartikan sebagai pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg,2002).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono,2018:476).

Tujuan penggunaan metode dokumentasi ini adalah untuk mendukung dan memperkuat data atau informasi yang diperoleh dari proses observasi ataupun wawancara. Adapun metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni pada artikel dan potret dari proses observasi ataupun proses wawancara terkait penelitian ini.

6) Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Selanjutnya dalam menganalisis data deskriptif kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Pola dalam menganalisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, display data dan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi

Dalam proses reduksi data akan mengacu pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Proses reduksi data merupakan penyederhanaan data dari lapangan yang mencakup penggolongan atau merangkum hal yang dianggap penting untuk dicantumkan. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written up field notes*) (Yusuf,2014:407).

2. Display Data

Setelah melakukan reduksi terhadap data-data pada lapangan Langkah selanjutnya yaitu menyajikan data-data tersebut agar data tersebut tersusun menjadi sebuah pola hubungan sehingga dapat dengan mudah dipahami.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis penelitian yakni menarik kesimpulan. Setelah menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan maka hasil dari kesimpulan tersebut diharapkan mampu memberi jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan dari awal penelitian.

7) Metode Penyajian Data

Dalam penelitian ini metode penyajian data yang dipakai yakni tabel, gambar dan narasi berdasarkan hasil penelitian dari lapangan.

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH KALURAHAN KARANGAWEN, KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNG KIDUL

A. Geografis

Keadaan geografis Karangawen merupakan salah satu Kalurahan dari 144 (Seratus Empat Puluh Empat) Kalurahan yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Kalurahan tersebut merupakan bagian dari pemerintahan Kapanewon Girisubo. Kapanewon Girisubo terdiri dari 8 (Delapan) Kalurahan. Kalurahan Karangawen terletak di barat pemerintahan kapanewon Girisubo. Secara geografis Kalurahan Karangawen berada pada $8^{\circ}8' \text{ LS}-8^{\circ}09' \text{ LS}$ dan $110^{\circ}43' \text{ BT}-110^{\circ}45' \text{ BT}$. Kalurahan Karangawen mempunyai Luas sekitar wilayah 625,2573 Ha, dan di bagi menjadi beberapa padukuhan yaitu Kepuh, Bandung, Tlasih, Langsep, Pokak, Tegalrejo, Karangawen dan Ngaglik. Berdasarkan kondisi topografi Kalurahan Karangawen merupakan Zona Selatan Kabupaten Gunungkidul, yang dalam RPJMD Kabupaten disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (*Duizon gebergton* atau *Zuider gebergton*), dengan ketinggian 0m-300 MDPL di atas permukaan laut. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (*Conical limestone*) dan merupakan kawasan karst. Lahan di Kalurahan mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi. Curah hujan rata-rata sebesar 1954,43 mm/thn dengan jumlah hari hujan rata-rata 89 hari. Bulan basah 4-5 bulan,

sedangkan bulan kering berkisar antara 7-8 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober-November dan berakhir pada bulan Maret-April setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember-Februari. Suhu udara untuk suhu rata-rata harian 27,7°C, suhu minimum 18,2°C dan suhu maksimum 33,4°C. Potensial untuk tanaman lahan kering (padi gogo dan palawija), tanaman buah-buahan (pisang, srikoyo, sirsat, dll), budidaya perikanan perairan darat (telaga) dan perikanan tangkap serta untuk usaha budidaya ternak (penggemukan).

Kalurahan Karangawen merupakan Kalurahan dengan luas wilayah relatif kecil di bandingkan dengan wilayah Kalurahan lain di Kapanewon Girisubo. Secara Administratif Kalurahan Karangawen mempunyai batas wilayah dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalurahan Tileng dan Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo dan Kalurahan Bohol, Kapanewon Rongkop
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo

Sedangkan orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) seperti yang sudah tercantum dalam data monografi Kalurahan Karangawen menjelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kecamatan 5,5 Km.
2. Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kota/IbuKota Kabupaten 41 Km.
3. Jarak Dari Ibu Kota Provinsi 71 Km.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kalurahan Karangawen



Sumber: Profil Kalurahan Karangawen

Dari gambar berupa peta diatas, dapat kita lihat dan amati pemetaan wilayah administrasi di Kalurahan Karangawen cukup luas, dan ada 8

Padukuhan, Rukun Tetangga 17 (Tujuh Belas), Rukun Warga 8 (Delapan) yang mana tersebar disetiap wilayah Kalurahan Karangawen.

B. Demografis

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data mengenai jumlah kependudukan di Kalurahan Karangawen tercatat yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 800 orang dan perempuan 833 orang sehingga jumlah keseluruhan masyarakat Karangawen berjumlah 1.633 orang. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa di Kalurahan Karangawen masyarakat yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, meskipun tidak begitu jauh jarak jumlahnya. Dengan demikian jumlah Kepala Keluarga berjumlah 535 Kk dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	800	48,98%
2	Perempuan	833	51,01%
Total		1.633	100%

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen

Berdasarkan tabel 1.1 diatas mengenai rincian jumlah penduduk di Kalurahan Karangawen dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk yang paling banyak adalah yang berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 833

orang sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 800 orang, keduanya memiliki selisih yang tidak terlalu jauh.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 2.2
Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Islam	1.182	72,38%
2	Kristen	443	27,12%
3	Khatolik	8	0,48%
4	Hindu	0	0
5	Budha	0	0
Total		1.633	100%

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen

Berdasarkan tabel diatas penduduk Kalurahahan Karangawen mayoritas beragama Islam, hal ini dibuktikan dengan data diatas yang menunjukkan jumlah penduduk yang beragama Islam yakni sebanyak 2.067 orang. Selain itu terdapat agama Kristen yakni sebanyak 443 orang dan agama Khatolik dengan jumlah sebanyak 8 orang. Sedangkan untuk agama Hindu dan Budha tidak ada. Berdasarkan data pada tabel diatas maka masyarakat di Kalurahan Karangawen hanya memeluk 3 agama yakni Islam, Kristen, dan Katolik.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

Tabel 2.3

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Ibu Rumah Tangga	123	7,53
2	Pelajar/Mahasiswa	135	8,26
3	Pensiunan	5	0,30
4	Belum Bekerja	236	14,45
5	ASN	21	1,28
6	Buruh/Tukang	37	2,26
7	Petani/Peternak/Nelayan	803	49,17
8	Karyawan BUMN/BUMD	3	0,18
9	Karyawan Swasta	152	9,30
10	Wiraswasta	92	5,63
11	Tenaga Medis	3	0,18
12	Pekerjaan Lainnya	23	1,40
Total		1633	100%

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pekerjaan penduduk Kalurahan Karangawen itu bermacam-macam. Akan tetapi pada tabel diatas terlihat bahwa pekerjaan sebagai petani/peternak/nelayan di Klaurahan Karangawen nyatanya memiliki jumlah terbanyak dari profesi-profesi lainnya dengan jumlah sebesar 803 orang. Jadi pada umumnya pekerjaan masyarakat diKalurahan Karangawen itu rata-rata berprofesi sebagai petani/peternak/nelayan.

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.4

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	312	19,10%
2	Belum Tamat SD/MI	130	7,96%
3	Tamat SD/MI	549	33,61%
4	SMP/MTS	316	19,35%
5	SMA/SMK/MA	254	15,55%
6	Diploma I/II	9	0,55%
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	9	0,55%
8	Diploma IV/Strata I	54	3,30%
Jumlah (Orang)		1.633	100%

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat Pendidikan yang paling mendominasi adalah tingkat Pendidikan tamat SD/MI yakni sebanyak 549 orang penduduk dan disusul oleh penduduk tingkat Pendidikan SMP/MTS yakni sebanyak 316 orang penduduk. Dengan demikian tingkat Pendidikan masyarakat Kalurahan Karangawen mayoritas memiliki tingkat Pendidikan tamat SD/MI, hal ini tentu sangat berpengaruh pada pengalaman, wawasan, ataupun tingkat pendidikan masyarakat yang tentunya berpengaruh pula pada pekerjaan penduduk yakni mayoritas berprofesi sebagai petani/peternak/nelayan.

C. UMKM

Perekonomian merupakan tulang punggung kesejahteraan masyarakat. UMKM sebagai salah satu usaha yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Kalurahan Karangawen dan banyak masyarakat Kalurahan yang berprofesi sebagai pelaku UMKM. oleh karena itu Pemerintah Kalurahan Karangawen berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat Kalurahan Karangawen salah satunya yaitu pengembangan UMKM yang sedang dijalankan oleh masyarakat. Adapun terkait perekonomian masyarakat Kalurahan Karangawen terdapat beberapa lembaga perekonomian terdapat di Kalurahan Karangawen, yakni sebagai berikut:

1. Lembaga Ekonomi dan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) terdiri atas 1 unit, dengan jumlah kegiatan sebanyak 5 dan memiliki kepengurusan inti 6 orang.
2. Jasa Lembaga Keuangan terdiri atas Industri Kecil dan Menengah seperti industri makanan sejumlah 7 unit dengan anggota kepengurusan sebanyak 35 orang.
3. Usaha Jasa dan Perdagangan yang terdiri atas Usaha toko/kios sebanyak 6 unit, dengan jenis produk yang diperdagangkan (umum, sayur, barang dan jasa tambang, dll) dengan menyerap 9 orang tenaga kerja. Toko Kelontong sebanyak 75 unit yang menyerap 17 orang tenaga pekerja.
4. Usaha Jasa Gas, Listrik, BBM dan Air yang mana berupa Usaha Penyewaan Tenaga listrik sebanyak 1 unit, Pengeceran Gas dan Bahan

Bakar 57 unit. Secara keseluruhan menyerap tenaga kerja sebanyak 60 tenaga kerja.

5. Usaha Jasa Keterampilan yang terdiri dari Tukang Kayu 115 unit, Tukang Batu 134 unit, Tukang Jahit/bordir 16 unit, Tukang Cukur 1 unit, Tukang Service Elektronik 5 unit, dan Tukang Pijat/Pengobatan 16 unit. Secara keseluruhan menyerap tenaga kerja sebanyak 287 orang.

Dari data diatas pada dasarnya sosial ekonomi Kalurahan Karangawen, dari segi ekonomi Kalurahan Karangawen sendiri berusaha meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Dilihat dari struktur ekonomi, menunjukkan bahwa penyumbang utama perekonomian Kalurahan Karangawen masih didominasi oleh sektor pertanian.

Di Kalurahan Karangawen terdapat beberapa masyarakat Kalurahan Karangawen berprofesi sebagai pelaku UMKM. Terdapat sekitar 40-an pelaku UMKM di Kalurahan Karangawen yang aktif dan terdapat pula pelaku UMKM yang aktif pada bidang makanan seperti keripik singkong, keripik pisang, peyek dan lain-lain. Jika dilihat dari kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM yang terdapat di Kalurahan Karangawen termasuk dalam usaha Mikro yakni dengan aset maksimal 50 Juta dan omset maksimal 300 juta. Berikut ini perincian masyarakat pelaku UMKM di Kalurahan Karangawen:

Tabel 2.5
Tabel Data Pelaku UMKM dan Hasil Usaha

No	Nama	Bidang Usaha
1	Miyem	Dagang Tempe
2	Rumiyem	Dagang Tempe
3	Suyanti	Aneka Snack
4	Rita Triati	Produksi Kue
5	Sumardi	Batako
6	Sudayat	Mebel
7	Sutini	Lempeng
8	Tumijem	Keripik
9	Samikem	Tempe
10	Winur Haini	Aneka Cemilan
11	Yurita Sugianti	Catering
12	Supeni	Cemilan
13	Sumaryanti	Aneka Cemilan
14	Pardi	Mebel
15	Parini	Gorengan
16	Artadi	Gorengan
17	Parni Astani	Catering
18	Widarno	Anyaman
19	Arina	Aneka Cemilan
20	Rutinem	Penjahit
21	Wakiran	Warung Kelontong
22	Suhariyati	Gorengan
23	Tusi Yanti	Keripik Singkong
24	Warinah	Warung Kelontong
25	Wasitem	Tempe
26	Rina Astuti	Penjahit
27	Rubinem	Warung Kelontong

28	Sugio	Mebel
29	Narto Reja	Anyaman
30	Sumiyati	Peyek
31	Sumiyarsi	Kue Kukus
32	Iva Noviani	Kue Brownis
33	Sutarsa	Mebel
34	Satikem	Kerupuk
35	Paelan	Mebel
36	Isnuryati	Aneka Cemilan
37	Satiyem	Aneka Cemilan
38	Siswanto	Catering
39	Sartini	Tempe
40	Rini Widayati	Warung Kelontong
41	Arina Kurnia Wati	Kue Bawang dan Keripik Singkong
42	Rukiyem	Produksi Tempe
43	Juliana Saniah	Produksi Kue
44	Sugiyantit	Produksi Kue
45	Sarpin	Anyaman

Sumber: Kamituwo Kalurahan Karangawen

Dari tabel data diatas menerangkan banyaknya jumlah masyarakat Kalurahan Karangawen yang berprofesi sebagai pelaku UMKM. Akan tetapi dalam menjalankan usahanya, masyarakat pelaku UMKM khususnya pelaku UMKM yang aktif pada bidang makanan dihadapi dengan beberapa permasalahan yang menjadi kendala ataupun hambatan dalam mengembangkan usaha tersebut. Kendala yang dihadapi tersebut salah satunya seperti tidak tersedianya wadah pemasaran produk dari pelaku UMKM sehingga tingkat produksi dari beberapa pelaku UMKM yang aktif

pada bidang makanan bergantung pada tersedia atau tidaknya wadah sebagai tempat pemasaran produk tersebut.

Dalam usaha mengembangkan UMKM yang terdapat di Kalurahan Karangawen pihak Pemerintah Kalurahan Karangawen telah berkontribusi akan tetapi bentuk fasilitasi pihak Pemerintah Kalurahan Karangawen sejauh ini belum mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM tersebut. Maka dari itu Pemerintah Kalurahan Karangawen perlu mengambil kebijakan sebagai bentuk fasilitasi Pemerintah Kalurahan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga dengan adanya fasilitasi dari Pemerintah Kalurahan Karangawen, diharapkan dapat membantu perkembangan usaha yang dijalankan oleh masyarakat dan tentunya dapat berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kalurahan Karangawen

D. Sarana Dan Prasarana

Kalurahan Karangawen memiliki potensi yang hampir sama dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana seperti yang ada di beberapa Kalurahan lain pada umumnya. Sarana dan prasarana sebagai infrastruktur untuk mendukung segala jenis kegiatan sosial ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan pengembangan sentra produksi. Secara umum Kalurahan Karangawen memiliki pembangunan sarana dan prasarana sebagai berikut:

- 1) Prasarana Jalan Kalurahan Karangawen sepanjang 15,54 km dengan perincian menurut kewenangannya adalah jalan provinsi sepanjang 2,94 km dan jalan Kalurahan 13,60 km. Kalurahan Karangawen dilalui oleh Jaringan Jalan Kolektor Primer sebagai Jalan Strategis sebagai Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang direncanakan mencapai panjang 2,9 km.
- 2) Sarana air bersih di Kalurahan Karangawen berasal dari air permukaan khususnya Telaga dan Bak penampungan air hujan, serta mengadakan dengan tangki. Khusus untuk sistem perpipaan, pasokan air bersih belum
- 3) dapat menjangkau wilayah Kalurahan. Guna mencukupi kebutuhan air bersih dilakukan dengan beberapa hal di antaranya: Pengembangan PAH (Penampungan Air Hujan), Pengaktifan SR dari PDAM, Dropping air Dropping air dilakukan dalam kondisi darurat yang biasanya dilakukan pada bulan Juni- Desember yang berasal dari bantuan baik dari pemerintah maupun swasta serta secara swadaya.
- 4) Prasarana Pemerintahan seperti kantor kalurahan sudah ada. Di Kalurahan Karangawen, kantor desa dan balai desa bertempat dalam satu gedung dan kompleks kantor desa. Dilihat dari efektivitasnya cukup baik karena segala kegiatan berkenaan terkait fungsinya gedung dapat dipantau dan diawasi oleh pihak pemerintah desa. Selain itu juga terdapat 8 balai padukuhan.

- 5) Prasarana Kesehatan Kalurahan Karangawen sendiri memiliki pustu. Kalurahan Karangawen juga mempunyai beberapa unit Posyandu yang aktif yang tersebar di padukuhan yang tugasnya melayani balita, pemberian imunisasi dan pemberian makanan tambahan.
- 6) Prasarana Pendidikan yang terdapat di Kalurahan Karangawen terdiri dari dua buah TK, satu buah PAUD, dan satu buah SD. Di Kalurahan Karangawen tidak memiliki SMP/SLTP dan SMA/SLTA sehingga masyarakat yang ingin melanjutkan Pendidikan kejenjang tersebut maka mereka harus pergi keluar dari Kalurahan Karangawen.
- 7) Prasarana keagamaan yang terdapat di Kalurahan Karangawen untuk memfasilitasi kegiatan ibadah atau keagamaan. Secara umum masyarakat Kalurahan Karangawen Sebagian besar menganut agama Islam sehingga dibangunlah masjid dibeberapa padukuhan. Selain itu juga terdapat dua buah gereja yang terletak dipadukuhan Kepuh dan padukuhan Tegalrejo.
- 8) Prasarana olahraga yang terdapat di Kaluraha Karangawen terdiri dari 4 buah lapangan bola voly dan 1 buah lapangan sepak bola.
- 9) Prasarana Budaya di Kalurahan Karangawen berupa Resan yang terdapat di padukuhan Bandung dan padukuhan Karangawen. Resan adalah pohon yang digunakan untuk berdoa dengan membakar dupa kemenyan yang dilakukan oleh juru kunci kalurahan.

E. Budaya

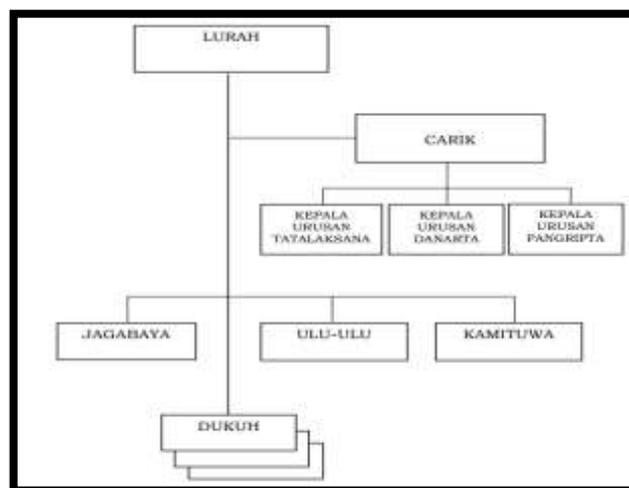
Kalurahan Karangawen secara umum kaya akan budaya baik itu kesenian, dalam bertani, maupun dalam pola hidup sebagaimana kehidupan masyarakat di desa. Salah satunya adalah budaya pertanian “Tumpangsari” yang sudah secara turun temurun dilakukan. Selain itu, adanya kebudayaan dalam hal ini kesenian seperti Rasulan, Ketoprak, Jathilan, dan lainnya. Meskipun demikian, budaya-budaya ini sebagian besar masih dipegang teguh oleh masyarakat namun tidak sedikit yang juga mulai meninggalkan budaya yang ada.

F. Pemerintahan

Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, DIY dipimpin oleh Erman Susilo, S.IP selaku Lurah dan dibantu oleh perangkat desa dan dibantu oleh kepala dusun/dukuh. Adapun struktur organisasi Pemerintah Kalurahan Karangawen yakni:

Gambar 2.2

Struktur Pemerintahan Kalurahan Karangawen



Sumber: Profil Kalurahan Karangawen

Sedangkan untuk Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) sebagai berikut:

1. Ketua: Nanto Riyadi, S.Pd
2. Wakil Ketua: Sugeng
3. Sekretaris: Suci Ambarwati
4. Ketua Bidang: Sulardi dan Riyadi
5. Anggota: Supardal dan Sigit Utomo Putro

G. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya pemerintahan yang transparan, terbuka terhadap saran dan masukan, jujur dalam setiap tindakan dan adil bagi semua golongan masyarakat. Selalu mementingkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menghadapi setiap persoalan, melakukan pelayanan publik yang cepat prosesnya, mudah syarat-syaratnya tepat sasaran. Selalu meningkatkan profesionalisme bagi seluruh pamong dan perangkatnya. Menjadikan spiritual roh dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan budaya dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat. Mengembangkan sistem usaha mandiri melalui pemberdayaan BUMDes/BUMKal. Serta dengan menggalang silaturahmi antar dan inter golongan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan di Kalurahan.

b. Misi

Adapun misi Kalurahan Karangawen yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yg transparan, jujur dan adil
2. Mengedepankan musyawarah mufakat baik dengan pemerintah kalurahan maupun masyarakat
3. Mengutamakan pelayanan publik yang cepat mudah dan tepat
4. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah kalurahan
5. Menanamkan nilai-nilai religius, budaya, kearifan lokal, melalui program pengembangan spiritual dan adat istiadat
6. Mewujudkan sistem usaha mandiri melalui program BUMKAL
7. Menggalang silaturahmi untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini peneliti memberikan Kesimpulan dan Saran untuk Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan UMKM di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dari itu peneliti akan mencoba menjelaskan dengan memberikan kesimpulan dan Saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang Peneliti lakukan atau laksanakan di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, D.I Yogyakarta dengan judul “Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan UMKM”, Maka dari itu Peneliti mencoba menyimpulkan pembahasan yang mendasari dari penjelasan pada setiap bab-bab terdahulu sehingga bisa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Dalam Mengembangkan UMKM

Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Dalam Mengembangkan UMKM, menunjukkan bahwa pihak Pemerintah Kalurahan telah mengadakan kegiatan berupa pelatihan terhadap beberapa pelaku UMKM, akan tetapi dalam kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Kalurahan Karangawen yakni kegiatan pelatihan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat pelaku UMKM yang terdapat di Kalurahan Karangawen. Yang dimana sebelum melakukan kegiatan pihak Pemerintah Kalurahan Karangawen seharusnya melakukan perencanaan secara baik dalam hal ini dengan berbagai pertimbangan, sehingga semua pelaku UMKM

yang terdapat di Kalurahan Karangawen dapat terlibat dalam kegiatan terkait. Maka dari itu dengan keterlibatan tersebut, semua pelaku UMKM yang terdapat di Kalurahan Karangawen bisa merasakan dampak dari kegiatan yang diadakan seperti kegiatan pelatihan tersebut. Selain itu juga dari hasil analisis data diatas dapat kita ketahui bahwa perhatian dari pihak Pemerintah Kalurahan Karangawen terhadap pelaku UMKM belum efektif atau optimal, hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya keterlibatan pihak Pemerintah Kalurahan Karangawen dalam membantu segala urusan perizinan dari pelaku UMKM.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM.

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM dapat disimpulkan bahwa dalam usaha pengembangan UMKM terdapat fakto-faktor yang mendukung dan menghambat pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM. Banyaknya masyarakat di Kalurahan Karangawen yang aktif dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga UMKM merupakan salah satu usaha yang berpotensi maju di Kalurahan Karangawen. Sebagai salah satu usaha yang berpotensi maju, maka hal tersebut mendukung Pemerintah Kalurahan Karangawen untuk mengembangkan UMKM yang terdapat di Kalurahan Karangawen tersebut.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat Pemerintah Kalurahan dalam pembangan UMKM di Kalurahan Karangawen yakni keterbatasan Dana, sehingga jumlah dana yang dianggarkan untuk pengembangan UMKM tidak cukup untuk membantu permodalan dari setiap pelaku UMKM. Adapun faktor lain yang

menjadi penghambat Pemerintah Kalurahan Karangawen dalam pengembangan UMKM seperti semangat masyarakat pelaku UMKM yang masih rendah, dan faktor kurang tersedianya wadah sebagai tempat pemasaran produk UMKM. Dari faktor kurang tersedianya wadah sebagai tempat pemasaran tersebut tentunya berpengaruh terhadap produksi masyarakat pelaku UMKM yang terdapat dikalurahan Karangawen, Yang dimana masyarakat pelaku UMKM tidak dapat memproduksi dalam jumlah yang banyak karena terbatasnya wadah pemasaran untuk menjual hasil produksi tersebut. Akan tetapi pihak Pemerintahan Kalurahan Karangawen telah mengalokasikan dana dari dana tahun anggaran 2023. Adapun tujuan dianggarkannya dana tersebut guna untuk mengadakan kegiatan pameran pembangunan, kegiatan pameran tersebut bertujuan terciptanya suatu wadah baru sebagai tempat pemasaran produk pelaku UMKM di Kalurahan Karangawen.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang Peneliti lakukan atau laksanakan di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul dengan judul “Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan UMKM”, Maka dari itu Peneliti mencoba memberikan saran pada pembahasan yang mendasari dari penjelasan pada setiap bab-bab terdahulu sehingga bisa didapatkan saran sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Dalam Mengembangkan UMKM

Pemerintah Kalurahan Karangawen perlu menjalin kerjasama dengan pihak eksternal, sehingga diharapkan dapat terciptanya wadah pemasaran yang baru

melalui kerjasama dengan pihak eksternal tersebut. Dalam usaha merintis Kalurahan Karangawen menjadi Desa Preneur, pemerintah Kalurahan Karangawen disarankan memberi perhatian khusus terhadap organisasi Preneur tersebut, sehingga organisasi preneur yang ada di Kalurahan Karangawen dapat berjalan serta aktif dalam usaha pengembangan UMKM. Selain itu, Dalam usaha pengembangan UMKM pihak pemerintah kalurahan Karangawen perlu mengalokasikan dana dari yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2023 untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai modal usaha ataupun pemerintah Kalurahan Karangawen menyediakan bantuan peralatan kepada pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Selain itu juga pihak Pemerintah Kalurahan Karangawen perlu meningkatkan perhatian khusus melalui membantu dan mendampingi setiap masyarakat pelaku UMKM dalam mengurus administrasi yang berkaitan seperti pengurusan PIRT ataupun pengajuan sertifikat halal.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM.

Pemerintah Kalurahan Karangawen diharapkan membuat agenda khusus untuk mengadakan pertemuan dengan melibatkan seluruh pelaku UMKM di Kalurahan Karangawen sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan sehingga dengan diadakannya kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong semangat dan kekompakan dari para pelaku UMKM di Kalurahan Karangawen. Hal ini dikarenakan sejauh ini semangat dan kekompakan pelaku UMKM dinilai masih kurang atau rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Skripsi

- Fernandes Simangunsong, Guno Tri Tjahjoko (2021). *Hajat Hidup Orang Banyak: Jalan Ketiga Ilmu Pemerintahan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri-Kementerian Dalam Negeri, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"*.
- Irma Anita Dinita, Sampara Lukman dan Kusworo. (2021). *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dodol Kentang Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Lubuknagodang Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Program Magister terapan studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintah Dalam Negeri.*
- Marantika Fibrianti Sumadi dan Ananta Prathama. (2021). *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dodol Kentang Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Lubuknagodang Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.*
- Mulyana, Agung Nurrahman, Abdurohim. (2021). *Penguatan Peran Pemerintah Desa Cileles dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil (UMK). Insitut Dalam Negeri.*
- Moleong. (2005). *Pokok-pokok pengertian Penelitian Kualitatif*
- Monicha Dwipi Salam dan Ananta Prathama. (2022). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM. FISIP, Universtas Pemebangunan Nasional, Jawa Timur.*
- Padma Lalita Nur Priyani. (2021). *Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Umkm Oleh Pemerintah Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. FIS, Universitas Negeri Yogyakarta*
- Sony Hendra Permana. (2017). *Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*
- Syahputri Siregar dan Tomi Jaffisa. (2021). *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Laut Dendang. Universitas, Dharmawangsa.*
- Vicko PratamaYudda. (2020). *Tindakan-Tindakan Pemerintah*
- Wury Hartanti, Wury Hartanti dan Christiawan Hendatmoko. (2021). *Peran Pemerintah Kelurahan Mangkubumen Dalam Pengembangan UMKM. STIE, Surakarta.*

Sumber Lain

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 *Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Dana Desa.*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 *Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 93 Tahun 2015 *Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.*
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 *Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan.*
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 *Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan.*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mirko, Kecil, dan Menengah (UMKM)*

Lampiran



Gambar wawancara dengan Lurah dan Pamong Kalurahan Karangawen



Gambar Wawancara dengan Masyarakat Pelaku UMKM